

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS DATA PANEL PROVINSI DI INDONESIA

Ade Ananto Terminanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

adeanantoterminanto@uinjkt.ac.id

Ali Rama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

rama@uinjkt.ac.id

Abstrak

Indonesia's economy grows persistently with positive growth when developed countries are otherwise. In the meantime, government expenditure increases gradually in order to boost economic growth of the country. In literatures, the impact of government fiscal policy to the outputs or national income varies, as well as the impact of banking sector including Islamic banking sector. Therefore, this study aims to empirically analyze the impact of government expenditure and Islamic banking financing for economic growth by utilizing panel data of 33 provinces in Indonesia during 2010-2015. Besides that, the number of investment and employment were included as explanatory factors for regional economic growth in the study. Methodologically, common, fixed and random effects were employed to estimate coefficient of the independent variables. The study finds that government expenditure, Islamic banking financing, investment and number of employments have significant-positive influence to regional economic growth

in Indonesia. Therefore, government's fiscal policy as well as Islamic banking financing contributed to the economic growth

Keywords: *Government expenditure, Islamic banking financing, investment, employment, economic growth*

Abstract

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten secara positif di saat negara-negara maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat dari waktu ke waktu dengan maksud untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berdasarkan studi empiris kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pendapatan nasional menunjukkan kesimpulan yang beranekaragam. Begitupula dengan pengaruh sektor perbankan termasuk di dalamnya sistem perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia untuk periode 2010-2015. Selain itu, tingkat investasi dan tenaga kerja dimasukkan sebagai faktor explanatori untuk pertumbuhan ekonomi regional. Metode *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* digunakan untuk mengestimasi nilai pengaruh variabel-variabel independen. Penelitian ini menemukan bahwa belanja pemerintah, pembiayaan banks syariah, investasi dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan fiskal pemerintah dan kegiatan intermediasi perbankan syariah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *belanja pemerintah, pembiayaan syariah, investasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi.*

LATAR BELAKANG

Di saat Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa mengalami krisis keuangan khususnya pada tahun 2007, Indonesia justru tumbuh positif sekitar 4% pertahun. Indonesia mengalami trend pertumbuhan ekonomi yang positif setelah mengalami krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997-1998. Sejak 1999 perekonomian Indonesia mengalami proses *recovery* dan dapat tumbuh dari pertumbuhan ekonomi negatif menjadi tumbuh antara 4-6% di tahun-tahun berikutnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5.5% pertahun dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar RP 8,568 triliun per tahun. Laporan tahunan Bank Dunia menyebutkan bahwa PDB Indonesia mampu tumbuh rata-rata sekitar 5.8% dalam lima tahun belakangan. Jumlah PDB Indonesia yang cukup besar tersebut mengantarkan Indonesia masuk ke dalam jajaran negara G-20, yaitu negara dengan tingkat output yang terbesar di dunia. Indonesia saat ini berada di urutan ke-12 di dunia.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan tentunya jumlah

pengangguran dan kemiskinan akan berkurang. Jika jumlah agregat output (Y) meningkat maka akan menyebabkan pengurangan tingkat pengangguran (*unemployment*) dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah orang miskin (tingkat kemiskinan) (lihat Case dan Fair, 2014). Oleh karena itu, salah satu fokus utama dalam perekonomian adalah bagaimana meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Keynes meyakini bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menstimulasi peningkatan produksi barang dan jasa melalui dua bentuk kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu bentuk kebijakan fiskal adalah meningkatkan belanja pemerintah (ΔG) demi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu perekonomian (lihat Case dan Fair, 2014; Mankiw, 2010). Teori Keynes ini cukup sukses mengeluarkan negara-negara Eropa dari depresi besar (*great depression*) yang terjadi pada tahun 1930.

Hampir semua negara saat ini dalam mengelola perekonomiannya meyakini konsep Keynes tersebut bahwa negara memiliki sumber daya ekonomi untuk menggerakkan perekonomian melalui kebijakan

fiskal yang salah satu bentuknya adalah belanja pemerintah. Indonesia termasuk negara yang meyakini teori tersebut. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah secara konsisten mengalokasikan belanja yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan sebanyak 63% dari tahun 2007 sampai 2011. Sementara belanja pemerintah daerah lebih tinggi lagi, yaitu meningkat rata-rata sebanyak 83% pada periode yang sama.

Penelitian tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, apakah berpengaruh secara positif atau negatif belum ada kesimpulan yang sama (Sinulingga, 2015). Namun setidaknya mazhab Keynes (*Keynesian school of thought*) meyakini bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong peningkatan output (pendapatan) dalam suatu perekonomian. Belanja pemerintah dianggap sebagai variabel eksogenus yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, peningkatan belanja pemerintah dapat memicu terjadinya defisit anggaran (lihat Awe dan Funlayo, 2014; Sriyana, 2011; Yurdakul dan Ucar, 2015).

Studi empiris tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya ditemukan tiga pola hubungan, yaitu; *pertama*, berhubungan positif. Artinya, belanja pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (lihat Fan, Zhang, dan Rao, 2004; Hong dan Ahmed, 2002; Loizides dan Vamvoukas, 2005; Nasiru, 2012). *Kedua*, berpengaruh negatif, artinya belanja pemerintah justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan terjadi inefisiensi dalam belanja pemerintah (lihat Barro, 1990; 1991). *Ketiga*, hubungan keduanya tidak signifikan, artinya bahwa belanja pemerintah tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (lihat Agell, Lindh dan Ohlsson, 1999; Barro, 1991).

Selain belanja pemerintah, sektor perbankan juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja positif sektor keuangan dan perbankan akan berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi suatu negara. Sektor keuangan dan perbankan bisa menjadi sumber utama pertumbuhan sektor riil ekonomi. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga perbankan yang dialokasikan pada sektor-sektor riil maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan

dalam sebuah perekonomian. Rama (2013) mengidentifikasi setidaknya empat kemungkinan pendekatan yang bisa menjelaskan hubungan sebab akibat antara sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu; 1) perbankan dan keuangan adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi (*finance-led growth hypothesis*) atau biasa disebut “*supply-leading view*”, 2) perbankan dan keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi (*growth-led finance hypothesis*) atau biasa disebut “*demand-following view*”, 3) hubungan saling mempengaruhi antara perbankan dan keuangan dan pertumbuhan atau biasa disebut “*the bidirectional causality view*”, dan 4) perbankan dan keuangan dan pertumbuhan tidak saling berhubungan atau biasa disebut “*the independent hypothesis*.”

Saat ini juga telah hadir sistem perbankan syariah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional (lihat Rama, 2015). Sistem perbankan syariah menawarkan produk dan layanan keuangan dan perbankan yang relatif sama dengan sistem konvensional namun mereka beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah terutama dalam transaksinya tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar (Rama dan Kassim, 2013). Studi tentang pengaruh sektor perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas

(diantaranya, lihat Abduh dan Omar, 2012; El-Galfy dan Khiyar, 2012; Furqani dan Mulyany, 2009; Rama, 2013). Mengingat juga industri ini di Indonesia misalnya masih relatif kecil, tidak lebih dari 5% pangsa pasarnya (lihat Rama, 2015, 2016).

Dengan demikian, kebijakan fiskal pemerintah melalui belanja anggaran dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Begitupula dengan sistem perbankan melalui kebijakan pembiayaan yang diberikan kepada sektor-sektor ekonomi menjadi penopang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kedua sektor ini memiliki ciri-ciri yang sama khususnya pada kemampuannya untuk meningkatkan sisi permintaan (*demand*) sehingga mendorong peningkatan pendapatan nasional atau output. Secara teori output (Y) dapat ditingkatkan dengan cara peningkatan pada segi permintaan (*aggregate demand*) dimana didorong oleh sektor belanja pemerintah dan pembiayaan sektor perbankan.

Berdasarkan pada kajian tersebut ditemukan bahwa pengaruh belanja pemerintah dan sektor perbankan masih diperdebatkan. Hal ini dikarenakan studi empiris yang menunjukkan pola hubungan yang berbeda-beda. Oleh karena

itu, penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia selama periode 2010-2016. Penelitian ini juga memasukkan tingkat investasi dan jumlah tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

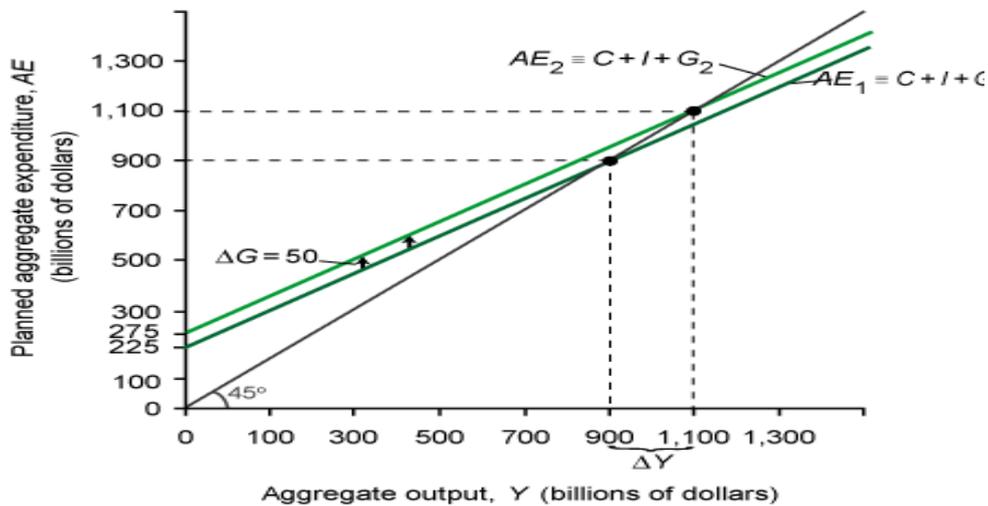
KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Hubungan antara Belanja Pemerintah dan Sektor Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peran pemerintah dalam perekonomian telah lama diperdebatkan di kalangan ekonom. John M. Keynes dan pengikutnya termasuk G. Mankiew dan P. Samuelson yang mengembangkan suatu konsep yang disebut sebagai "Keynesian Cross" untuk menjelaskan bagaimana belanja pemerintah dapat berpengaruh terhadap peningkatan tingkat output (pendapatan) dalam perekonomian. Belanja pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat output dan oleh karenanya peningkatan belanja pemerintah akan

meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Keynes berargumentasi bahwa pemerintah dapat menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui kebijakan perpajakan dan belanja pemerintah. Sementara Adam Smith yang disebut sebagai bapak ilmu ekonomi bersama para pendukungnya yang biasa disebut sebagai ekonom klasik dan neoklasik berpandangan bahwa pemerintah harus dibatas perannya dalam perekonomian. Pemerintah hanya dianjurkan untuk menjaga hak kekayaan dan memastikan berlangsungnya kompetisi dalam sistem pasar.

Kurva 1: Belanja Pemerintah dan Output



Sumber: Case dan Fair (2014)

menaikkan pajak.

Menurut Case dan Fair (2014) pemerintah dapat mempengaruhi output dalam suatu perekonomian melalui dua bentuk saluran, yaitu belanja pemerintah (G) dan Pajak (T). kedua jenis saluran itu biasa disebut kebijakan fiskal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan meningkatkan belanja pemerintah (G), atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan keluaran output, atau pendapatan nasional (Y). Sebaliknya, pemerintah dapat juga melakukan kebijakan fiskal kontraksi dengan maksud memperlambat laju pertumbuhan ekonomi (Y) dengan cara mengurangi belanja pemerintah (G) atau

Kurva 1 mengilustrasikan bagaimana kebijakan fiskal, yaitu dengan meningkatkan belanja pemerintah (G) mendorong peningkatan agregate output (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah dapat menstimulasi peningkatan output. Output yang meningkat diartikan sebagai peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian.

Sementara hubungan antara sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi menurut penelitian Rama (2013) setidaknya dapat

dijelaskan melalui empat pendekatan teori, yaitu; **pertama**, *finance-led growth hypothesis*. Yaitu, teori ini secara umum menganggap bahwa sektor keuanganlah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. **Kedua**, *growth-led finance hypothesis*. Yaitu, perkembangan sektor keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi atau aktivitas wirausaha (*enterprise*) mendorong pertumbuhan sektor keuangan. **Ketiga**, *the bidirectional causality view*. Aliran pemikiran ekonomi ini menggambarkan hubungan dua arah atau saling mempengaruhi antara sektor perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. **Keempat**, *the independent hypothesis*. Yaitu, sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan saling mempengaruhi.

2. Studi Terdahulu tentang Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Studi terdahulu tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan dan menghasilkan kesimpulan

yang beranekaragam. Begitupula dengan pengaruh sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil yang juga beragam. Namun, studi tentang pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Dan sejauh pengamatan penulis, studi tentang pengaruh belanja pemerintah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam satu model yang sama belum pernah dilakukan sebelumnya.

Studi Fan et al. (2004) tentang hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi studi kasus negara Uganda menemukan bahwa belanja pemerintah pada sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, belanja pemerintah juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Barro (1991) dengan menggunakan data *cross section* yang menunjukkan bahwa terjadi hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah. Dengan demikian terjadi inefisiensi pada belanja pemerintah.

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Sriyana (2011) menemukan bahwa belanja pemerintah sukses mendinamisasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor pasar modal. Dengan demikian, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Loizides dan Vamvoukas (2005) dengan menggunakan data panel menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah berkontribusi signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam sistem keuangan Islam, penelitian empiris sejauh ini yang telah dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi, superioritas dan stabilitas bank-bank Islam dibandingkan bank-bank konvensional untuk mencapai target fungsi intermediasi moneter yang difokuskan pada pencapaian kesinambungan pertumbuhan riil ekonomi, penurunan inflasi dan pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem keuangan yang tidak menggunakan bunga (*interest-free banking system*)

adalah lebih unggul dalam mencapai target moneter (lihat Darrat, 1988). Sementara itu, Remali dan Wilson (2005) menemukan bahwa tidak ada bukti secara empiris yang menunjukkan keunggulan dan stabilitas sistem bank non-riba dibandingkan dengan bank yang menggunakan riba (*interest based banking system*). Selanjutnya, Furqani dan Mulyany (2009) dalam penelitiannya tentang kontribusi perbankan Islam terhadap perekonomian Malaysia menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank-bank Islam. Sementara dalam konteks Indonesia, Rama (2013) menemukan adanya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembiayaan bank syariah. Variasi yang terjadi pada bank syariah dapat menjelaskan variasi pada pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Penelitian secara empiris yang membahas secara spesifik hubungan sektor keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas sekali.

Tabel 1 menyajikan ringkasan beberapa studi terdahulu tentang pengaruh belanja pemerintah dan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1: Studi Terdahulu Tentang Belanja, Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi

Peneliti	Judul	Metodologi	Temuan
Fan et al. (2004)	Government Expenditure, Growth and Poverty Reduction in Rural Uganda	Regresi	Belanja pemerintah pada penelitian di bidang pertanian meningkatkan tingkat produktivitas pertanian dan juga berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, belanja pemerintah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas pertanian.
Rama (2013)	Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia	Regresi	Perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pola hubungan dua arah, yaitu sektor perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi.
Sriyana (2011)	Analisis Hubungan Kinerja Sistem Keuangan (Perbankan dan Pasar Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990-2008)	VAR	Menemukan bahwa perubahan pada sektor perbankan lebih berperan dalam menjelaskan adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan perubahan pada pasar modal. Sedangkan hasil kausalitas Granger menunjukkan adanya <i>bi-directional causality</i> antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan volume kredit perbankan, serta kausalitas satu arah antara perkembangan kapitalisasi pasar saham dan pertumbuhan ekonomi.
Furqani dan Mulyany (2009)	Islamic Banking and Economic Growth: Empirical Evidence from Malaysia.	VAR	menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank-bank Islam. Penelitian ini dengan studi kasus di Malaysia
Loizides dan Vamvoukas (2005)	Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing	Granger causality	Alokasi belanja pemerintah ke berbagai wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan PDB regional.

METODOLOGI

1. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja pemerintah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian juga memasukkan tingkat investasi dan jumlah tenaga kerja bekerja sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun periode 2010-2015. Untuk mencapai tujuan penelitian, sejumlah data sekunder yang terkait dikumpulkan dari sumber yang relevan.

Tabel 2 menyajikan variabel-variabel penelitian dan sumber-sumber pengumpulan datanya.

2. Deskripsi Variabel dan Hipotesis Penelitian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah, pembiayaan bank syariah, tingkat investasi dan jumlah tenaga kerja bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus regional Indonesia untuk periode 2010-2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah indikator digunakan sebagai proksi dari variabel yang digunakan dalam penelitian.

Pertumbuhan ekonomi menurut Case dan Fair (2014) adalah peningkatan total output dalam perekonomian yang umumnya direpresentasikan melalui PDB (Produk Domestik Bruto).

Tabel 2: Sumber Data Penelitian

Variabel	Sumber Data
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Badan Pusat Statistik
Belanja Pemerintah	Kementerian Dalam Negeri
Pembiayaan Bank Syariah	Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
Tingkat Investasi	Badan Pusat Statistik
Jumlah Tenaga Kerja Bekerja	Badan Pusat Statistik

PDB itu sendiri adalah total nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode tertentu oleh faktor-faktor produksi yang ada dalam suatu negara. Dalam penelitian ini tingkat pertumbuhan ekonomi akan direpresentasikan oleh tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atau tingkat output barang dan jasa yang diproduksi di tingkat regional. Dalam konteks perekonomian tiga sektor, pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi makro ekonomi khususnya output atau pendapatan nasional melalui kebijakan fiskal baik dalam bentuk belanja pemerintah maupun sistem perpajakan. Belanja pemerintah (*government expenditure*) merupakan pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang diambil dari anggaran negara untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebagai representasi dari belanja pemerintah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sektor perbankan dalam berbagai kajian empiris berperan penting dalam memediasi aliran modal dari *surplus unit* kepada *defisit unit* melalui berbagai bentuk kredit dan pembiayaan sektor usaha. Pembiayaan bank syariah adalah jumlah dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan menggunakan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan akad-akad syariah (lihat Rama, 2015). Penelitian ini menggunakan jenis pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi sebagai representasi pembiayaan bank syariah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, berdasarkan model keseimbangan umum, yaitu dimana $Y =$ pendapatan nasional, $C =$ konsumsi rumah tangga, $I =$ investasi sektor swasta, $G =$ belanja pemerintah, dan $Exp - Imp =$ net hasil ekspor dan impor (lihat Case & Fair, 2014; Mankiw, 2010). Dengan demikian tingkat investasi menjadi variabel penting dalam pembentukan pendapatan nasional. Tingkat investasi umumnya dibagi menjadi investasi dalam negeri

dan investasi luar negeri. Penelitian ini menggunakan tingkat investasi luar negeri sebagai representasi dari variabel investasi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tenaga kerja juga berpengaruh terhadap tingkat produksi sebagaimana dikemukakan dalam fungsi produksi Cobb Douglas,

Tabel 3 menampilkan variabel penelitian beserta proksinya yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel tersebut juga menyajikan ekspektasi pengaruh variabel belanja pemerintah, pembiayaan bank syariah, tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3: Proksi dan Hipotesis Penelitian

Variabel	Proksi	Hipotesis
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	
Belanja Pemerintah (X1)	(i) Belanja pegawai, (ii) belanja barang dan jasa, dan (iii) belanja modal	Positif (+)
Pembiayaan Bank Syariah (X2)	(i) modal kerja, (ii) investasi, dan (iii) konsumsi	Positif (+)
Tingkat Investasi (X3)	Investasi luar negeri	Positif (+)
Tenaga Kerja (X4)	Jumlah tenaga kerja yang bekerja (<i>employed</i>)	Positif (+)

yaitu dimana Y = tingkat produksi, K = modal, dan L = tenaga kerja. *Labor* atau tenaga kerja adalah merupakan jenis faktor produksi proses produksi. Penelitian ini menggunakan jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai proksi dari tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Model dan Metode Analisis

Penelitian ini menganalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada sisi proses produksi berdasarkan pada pandangan yang dikembangkan oleh fungsi produksi agregat neoklasik yang umum dikenal sebagai fungsi produksi Cobb Douglas. Model ini umumnya menjelaskan

pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi (lihat Case dan Fair, 2014). Adapun fungsi Cobb Douglas adalah sebagai berikut:

Dimana level output dalam perekonomian direpresentasikan oleh tingkat PDB/PDRB (Y) dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada faktor produksi, yaitu modal (K) dan tenaga kerja (L). Berdasarkan pada fungsi produksi Cobb Douglas tersebut, penelitian ini selanjutnya melakukan pengembangan model dengan memasukkan beberapa variabel explanatory yang secara teoritis diduga berpengaruh terhadap tingkat produksi atau pertumbuhan ekonomi. Adapun variabel explanatorynya adalah belanja pemerintah, pembiayaan bank syariah, tingkat investasi dan jumlah tenaga kerja bekerja. Dengan demikian, model fungsi produksi hasil modifikasinya adalah:

Dimana: K = modal; L = tenaga kerja; F = pembiayaan bank syariah; I = investasi

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel, yaitu merupakan gabungan data

cross section dan data *time series*. Adapun model regresi linierny dituliskan dengan:

Dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh kebijakan belanja pemerintan dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan panel data. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan tingkat investasi dan jumlah tenaga kerja sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persamaan model yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi linier dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi data ke dalam model logaritma (model log). Hal ini dilakukan agar parameternya berbentuk linier. Adapun model regresi dalam bentuk log linier yang dikembangkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terdapat beberapa metode yang biasa dilakukan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Namun penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang secara umum digunakan terhadap model data panel, yaitu pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

a. Metode *common effect*

Metode *common effect* atau umumnya disebut sebagai metode OLS (Ordinary Least Square) mengestimasi data panel dengan menggabungkan *time series* dan *cross section* tanpa mempertimbangkan perbedaan antar waktu dan individu. Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Hal ini dikarenakan model ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar variabel sama dalam berbagai kurun waktu.

Dengan demikian metode *common effect* memiliki model persamaan regresi seperti model OLS, yaitu:

Kelemahan dari model *common effect* atau OLS dengan menggunakan data panel terletak pada

ketidakmampuan model ini untuk melihat perbedaan baik antar individu maupun antar waktu pada jenis data panel. Dengan demikian, hal ini tidak sesuai dengan tujuan digunakannya data panel. Sebagaimana terlihat pada model di atas bahwa baik *intercept* () maupun *slope* () tidak berubah baik antar individu maupun antar waktu.

Untuk mengatasi kelemahan model OLS atau *common effect* dalam mengestimasi regresi jenis data panel maka biasanya digunakan metode efek tetap (*fixed effect*) dan metode efek random (*random effect*).

b. Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Model OLS mengasumsikan bahwa *intercept* maupun *slope* adalah sama baik antar waktu maupun antar individu. Namun, asumsi ini jauh dari realitas sebenarnya khususnya bagi jenis data panel. Karakteristik antar individu atau perusahaan jelas akan berbeda, misalnya jumlah aset, sistem, manajemen, insentif, dan lainnya. Salah satu paling sederhana mengetahui

adanya perbedaan adalah dengan mengasumsikan bahwa *intercept* (perpotongan) adalah berbeda antara individu atau perusahaan sedangkan *slopenya* tetap sama antar individu atau perusahaan (lihat Widarjono, 2009).

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan *intercept* di dalam persamaan regresi dikenal dengan model regresi *fixed effect* (efek tetap), yaitu *slope* konstan tetapi *intercept* berbeda antar individu. Adapun model persamaannya adalah:

Subskrip (i) pada *intercept* persamaan di atas menunjukkan bahwa *intercept* tiap-tiap individu atau perusahaan berbeda. Perbedaan *intercept* ini menggambarkan adanya perbedaan atau variasi di antar individu atau perusahaan.

Model *fixed effect* data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan *intercept*. Oleh karena itu, model *fixed effect* biasa juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Model *fixed effect* dengan teknik variabel dummy adalah:

Jumlah variabel dummy (D) disesuaikan dengan jumlah individu atau perusahaan yang diteliti dalam jenis data panel. *Intercept* pada dummy menjadi *intercept* pembeda yang menjelaskan seberapa besar perbedaan *intercept* antar individu atau perusahaan. Memasukkan variabel dummy dalam model dimaksudkan untuk mewakili ketidaktehuan terhadap model yang sebenarnya.

c. Metode Random Random (*Random Effect*)

Memasukkan variabel dummy dalam model *fixed effect* berdampak pada berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter (Widarjono, 2009). Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) yang biasa disebut sebagai metode *random effect*. Jenis model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu atau perusahaan. Komponen *error* dikontribusikan oleh komponen individu dan

waktu. Oleh karena itu, *random error* perlu diuraikan menjadi *error* untuk komponen individu, *error* untuk komponen waktu dan *error* gabungan. Dengan demikian persamaan model *random error* adalah:

Dimana:

= komponen *error cross section*

= komponen *error time series*

= komponen *error gabungan*

Dengan demikian model *random effect* menganggap efek rata-rata dari data *cross section* dan *time series* direpresentasikan dalam *intercept*. Sedangkan deviasi efek secara random untuk data *time series* direpresentasikan dalam deviasi deviasi untuk data *cross section* dinyatakan dalam (Nachrowi dan Usman, 2006). Dengan demikian variabel gangguan adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu. Oleh karena itu, model *random effect* sering juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM).

Pada model *random effect* berpotensi adanya korelasi antara variabel

gangguan, sehingga metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien (lihat Widarjono, 2009). Oleh karena itu, metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effect* adalah *Generalized Least Squares* (GLS).

Selanjutnya diantara ketiga metode analisis regresi data panel tersebut, metode mana yang paling cocok untuk digunakan? Sebenarnya masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk membandingkan mana hasil estimasi yang lebih baik antara hasil estimasi *common effect* dengan *fixed effect* dilakukan dengan cara Uji Cow. Sementara pemilihan mana hasil estimasi yang paling tepat antara *fixed effect* dengan *random effect* dilakukan dengan cara Uji Hausman. Aplikasi software *eviews* membantu untuk melakukan perbandingan hasil estimasi ketiga model tersebut.

1. HASIL DAN INTERPRETASI

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh

belanja pemerintah, pembiayaan bank syariah, tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia dari periode 2010 sampai 2015. Bagian ini dimulai dengan analisis deskriptif masing-masing data variabel penelitian di 33 provinsi di Indonesia. Analisis ini memberikan gambaran tentang kondisi provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan variabel-variabel penelitian. Bagian selanjutnya adalah analisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap dependen dengan menggunakan model regresi panel.

1. Analisis Deskriptif Data Variabel Penelitian

DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia memiliki rata-rata jumlah PDRB tertinggi di bandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia pada periode 2010-2015. Selain itu, Jabar (Jawa Barat) dan Jatim (Jawa Timur) juga termasuk provinsi yang memiliki tingkat PDRB terbesar di Indonesia dengan rata-rata di atas Rp 1,000 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut

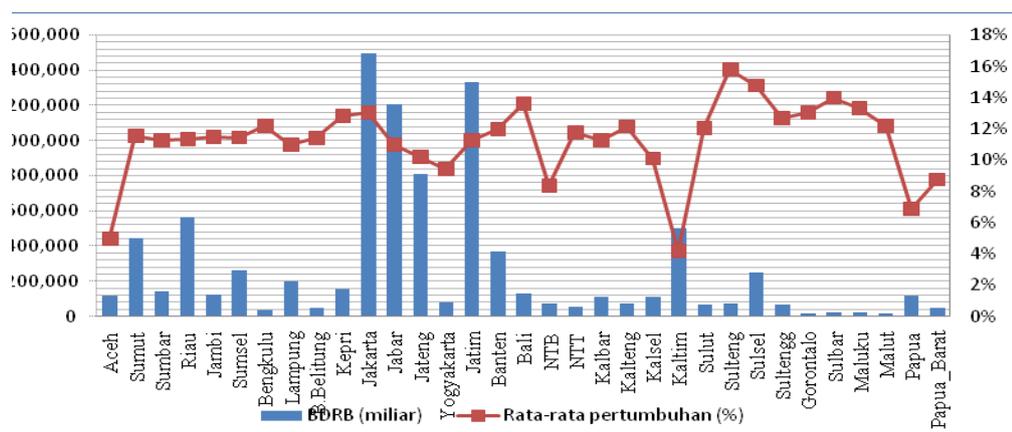
merupakan kontributor utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional. Provinsi dengan volume PDRB menengah adalah Jateng (Jawa Tengah), Kaltim (Kalimantan Timur) dan Riau dengan nilai PDRB di kisaran Rp 400 - Rp 1,000 triliun. Sementara mayoritas jumlah PDRB provinsi-provinsi di Indonesia berada di bawah rata-rata Rp 400 triliun. Maluku (Maluku Utara), Gorontalo, Sulbar (Sulawesi Barat), Maluku dan Bengkulu termasuk provinsi-provinsi dengan tingkat PDRB terendah. Dengan demikian, Grafik 1 menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan tingkat produk barang dan jasa yang direpresentasikan oleh nilai PDRB yang relatif besar di antara wilayah-wilayah di Indonesia.

Selain itu, Grafik 1 juga menunjukkan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDRB) provinsi dari periode 2010-2015. Perekonomian provinsi-provinsi secara keseluruhan tumbuh secara rata-rata sebesar 11.25% dimana Sulteng dan Sulses tumbuh paling tinggi sebesar masing-masing 15.78% dan 14.76%. sebaliknya, Kaltim dan Aceh termasuk provinsi yang tumbuh paling rendah, yaitu di bawah 5%. Dengan

demikian, pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi relatif merata meskipun skala ekonominya relatif jauh berbeda.

barang dan jasa dan modal. Sementara provinsi lainnya, belanja pemerintah rata-rata di bawah Rp 5 triliun.

Grafik 1: Rata-Rata Jumlah dan Pertumbuhan PDRB per Provinsi Periode 2010-2015



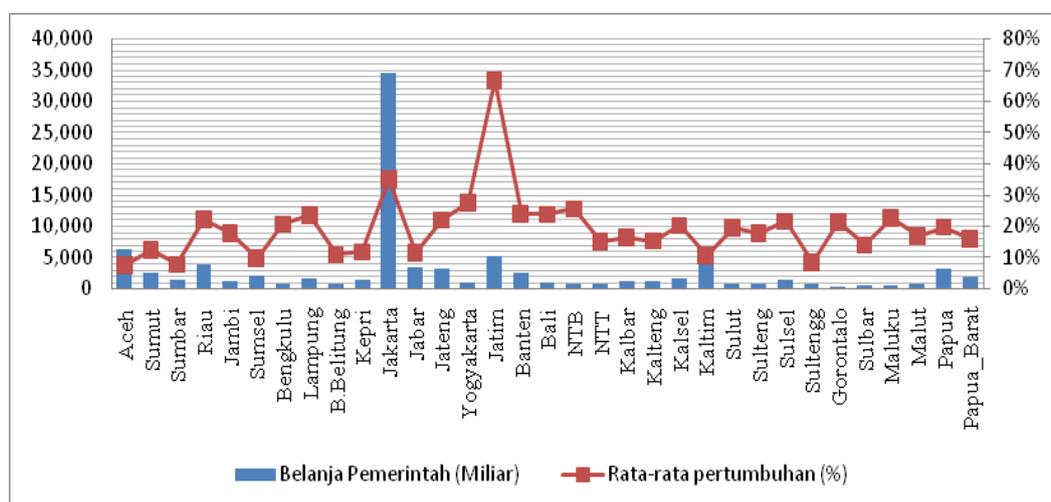
Sumber: data diolah

Grafik 2 menampilkan rata-rata jumlah dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah untuk periode 2010-2015. Belanja pemerintah dalam penelitian ini meliputi: (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang dan jasa, dan (iii) modal.

Dengan jumlah PDRB yang paling besar tentunya DKI memiliki ruang fiskal yang paling besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pemerintah DKI mengalokasikan sebesar Rp 35 triliun untuk anggaran belanja pegawai,

Setidaknya terdapat sekitar 11 provinsi yang memiliki belanja pemerintah di bawah Rp 1 triliun. Dengan demikian, provinsi-provinsi di Indonesia memiliki ruang fiskal yang relatif kecil dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Grafik 2: Rata-Rata Jumlah dan Pertumbuhan Belanja Pemerintah per Provinsi Periode 2010-2015



Sumber: data diolah

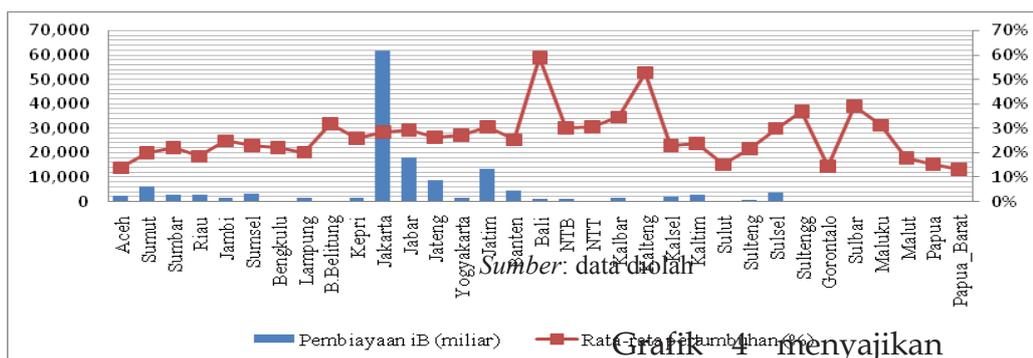
Hal yang menarik adalah bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah masing-masing provinsi sebesar 20%. Jatim merupakan yang paling tinggi dengan tumbuh rata-rata sebesar 70% dalam kurun 6 tahun. Sementara itu hanya sekitar 5 provinsi yang tumbuh di bawah 10%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata provinsi mengalami peningkatan pendapatan setiap tahun yang selanjutnya berdampak pada membesarnya ruang fiskal yang semakin besar, yaitu belanja pemerintah setiap tahun.

Jumlah pembiayaan bank syariah beserta rata-rata pertumbuhannya di masing-masing provinsi disajikan dalam Grafik 3. Komponen pembiayaan bank syariah pada penelitian ini meliputi (i) modal kerja, investasi dan konsumsi. Grafik 3 menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bank syariah di masing-masing provinsi masih relatif rendah. Hanya DKI Jakarta dan Jabar yang memiliki jumlah pembiayaan rata-rata di atas Rp 15 triliun, yaitu dengan jumlah masing-masing Rp 62 triliun dan Rp 18 triliun. Selanjutnya Jatim (Rp 13.7 triliun), Jateng (Rp 9 triliun), dan Sumut (Rp 6.5 triliun). Sisinya banyak di bawah Rp 1 triliun. Maluku

memberikan pembiayaan yang paling rendah dengan hanya sekitar rata-rata Rp 77 miliar dalam periode 2010-2015. Rendahnya tingkat pembiayaan bank syariah (rata-rata Rp 4.6 triliun) tentunya sejalan dengan jumlah aset bank syariah (*market share*) secara nasional yang relatif rendah, yaitu masing di bawah 5% (lihat Rama, 2016).

K. Belitung, NTT, NTB dan Sulsel tumbuh rata-rata di atas 30%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah yang meskipun masih relatif rendah terus diminati dan semakin memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Grafik 3: Rata-Rata Jumlah dan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah per Provinsi Periode 2010-2015



Grafik 4 menyajikan rata-rata investasi beserta pertumbuhannya yang terlaksana di masing-masing provinsi dalam kurun periode 2010-2015.

Namun hal yang menggembarakan adalah bahwa rata-rata pertumbuhan tingkat pembiayaan bank syariah di masing-masing provinsi sekitar 27% dalam kurun periode 2010-2015. Provinsi yang secara jumlah aset bank syariah relatif rendah dibanding dengan provinsi lainnya justru tumbuh rata-rata sangat tinggi seperti, Kalteng, Bali, Sulbar, Sultengg, Kalbar,

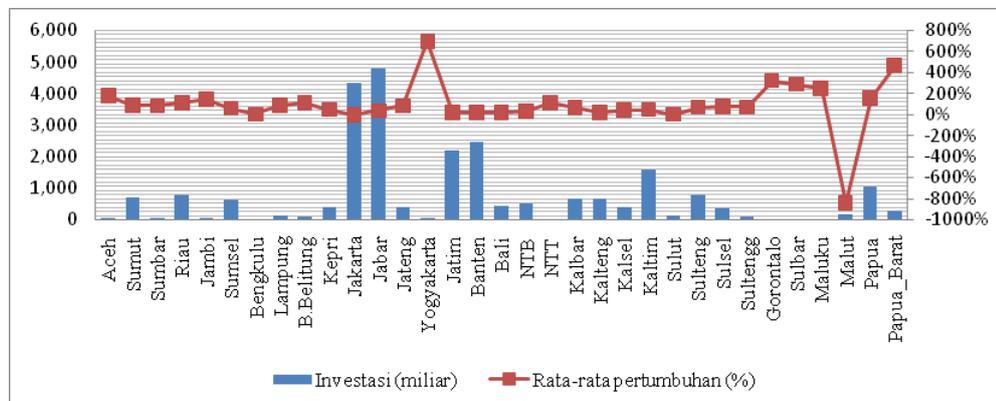
jumlah investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah investasi luar negeri. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa investasi yang terjadi di sepanjang tahun 2010 sampai 2015 relatif berbeda di sejumlah provinsi di Indonesia. Jakarta dan Jabar merupakan provinsi yang memiliki

volume investasi terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu masing-masing dikisaran Rp 4 triliun dan 4.8 triliun. Selain itu, Banten, Jatim dan Kaltim juga memiliki tingkat investasi yang relatif besar.

tahun belakangan ini justru minus, seperti Maluku, Sulut dan Bengkulu.

Terakhir, rata-rata jumlah pekerja atau angkatan kerja yang bekerja untuk periode 2010-2015 disajikan dalam Grafik 5.

Grafik 4: Rata-Rata Jumlah dan Pertumbuhan Investasi per Provinsi Periode 2010-2015



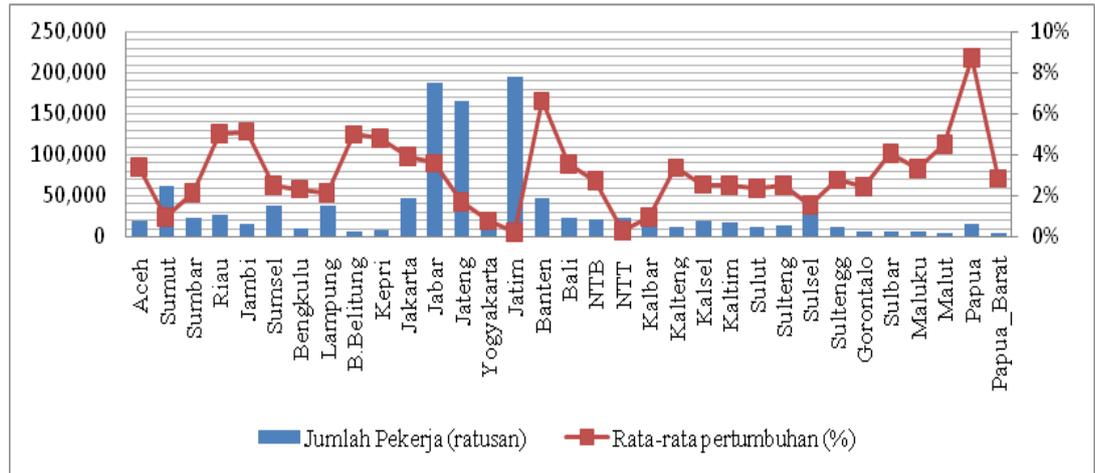
Sumber: data diolah

Sementara mayoritas provinsi lainnya memiliki tingkat investasi di bawah Rp 1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat investasi di masing-masing provinsi relatif tidak merata. Dengan demikian perlu usaha yang terencana untuk meningkatkan volume investasi di Indonesia. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan investasi relatif sama di masing-masing provinsi. Namun sayangnya ada provinsi yang pertumbuhan investasinya dalam kurun 6

Selain itu, grafik tersebut juga menampilkan rata-rata pertumbuhannya selama 6 tahun. Terlihat dengan jelas bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja paling banyak terdapat di pulau Jawa, yaitu Jatim, Jabar dan Jateng. Ketiga provinsi tersebut merupakan supplier tenaga kerja terbesar di Indonesia dengan jumlah total sekitar 55 juta pekerja. Rata-rata jumlah tenaga kerja di provinsi lainnya di kisaran 1-5 juta pekerja. Sementara Sulbar, Gorontalo dan NTT merupakan provinsi dengan

jumlah penduduk yang bekerja paling sedikit, yaitu di bawah 50 ribu pekerja.

Grafik 5: Rata-Rata Jumlah dan Pertumbuhan Pekerja per Provinsi Periode 2010-2015



Sumber: data diolah

Hal yang menarik adalah bahwa provinsi yang memiliki jumlah pekerja relatif rendah justru memiliki tingkat pertumbuhan pekerja secara rata-rata lebih besar, seperti Papu dan Banten yang tumbuh masing-masing sebesar 8.5% dan 6.8%. sebaliknya, provinsi dengan jumlah pekerja terbesar seperti Jatim justru tumbuh sangat rendah, yaitu di bawah 1% secara rata-rata. Namun secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata tenaga kerja bekerja di Indonesia relatif rendah, yaitu hanya sekitar 3%.

2. Hasil Estimasi dan Interpretasinya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan pandangan proses produksi dengan mengadopsi model fungsi produksi agregat neoklasik yang umumnya dikenal sebagai fungsi produksi Cobb Douglas. Untuk mencapai tujuan tersebut, model penelitian ini menginvestigasi hubungan antara belanja pemerintah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini

juga memasukkan tingkat investasi dan jumlah tenaga kerja bekerja sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan jenis data panel untuk 33 provinsi di Indonesia dengan periode 2010-2015. Semua data variabel ditransformasi ke dalam logartima (ln).

Tabel 4 menampilkan ringkasan hasil statistik deskripsi. Berdasarkan tabel tersebut terdapat 198 observasi, yaitu cross section sebanyak 33 provinsi dan time series selama 6 tahun (2010-2015).

Pertumbuhan paling rendah adalah sebesar 9.61% di provinsi Maluku Utara) pada tahun 2010. Sementara paling tinggi sebesar 14.50% di provinsi DKI Jakarta tahun 2015.

Adapun belanja pemerintah tumbuh rata-rata sebesar 14.31% di seluruh provinsi dimana yang paling rendah terjadi di provinsi Gorontalo sebesar 12.63% pada tahun 2010. Sebaliknya belanja pemerintah tertinggi sebesar 17.70% di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015.

Tabel 4: Statistik Deskripsi

Variabel	Obs	Cross sections	Mean	Standard Deviation	Maximum	Minimum
Ln PDRB	198	33	11.79987	1.188411	14.50033	9.614732
Ln Belanja Pemerintah	198	33	14.3145	0.883625	17.70746	12.63218
Ln Pembiayaan Syariah	198	33	7.15598	1.570558	11.39618	3.367296
Ln Investasi	198	33	5.22979	1.978541	8.871351	-1.60944
Ln Jumlah Pekerja	198	33	14.4748	1.003308	16.83383	12.73433

Dalam kurun waktu tersebut, provinsi-provinsi di Indonesia tumbuh secara rata-rata 11.79%.

Sumber: data diolah

Selanjutnya, pembiayaan yang diberikan

oleh bank syariah tumbuh rata-rata sebesar 7.15% di seluruh provinsi.

rata sebesar 14.47% dimana pertumbuhan paling tertinggi dan terendah sebesar 16.83% dan 12.73% di provinsi Jabar pada tahun 2013 dan provinsi Papua Barat pada tahun 2010.

Tabel 5: Hasil Uji Korelasi Pearson

Variabel	PDRB	BelanjaPe- merintah	Pembiay- aanSyariah	Investasi	Jumlah- Pekerja
PDRB	1.000000				
BelanjaPemerintah	0.808435	1.000000			
PembiayaanSyariah	0.910525	0.766601	1.000000		
Investasi	0.713586	0.607677	0.642620	1.000000	
JumlahPekerja	0.868144	0.565947	0.821783	0.549026	1.000000

Sumber: data diolah

Adapun tingkat terendah dan terbesar adalah 3.37% dan 11.39% di masing-masing provinsi Maluku (2010) dan DKI Jakarta (tahun 2015). Sementara itu tingkat investasi secara rata-rata tumbuh sebesar 5.23% di seluruh provinsi dimana tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi di provinsi Jabar (Jawa Barat) sebesar 8.87% pada tahun 2013. Sebaliknya, provinsi Gorontalo justru tumbuh paling rendah, yaitu minus sebesar 1.61% pada tahun 2012. Terakhir, jumlah

tenaga kerja yang bekerja di seluruh provinsi di Indonesia tumbuh rata-

Hubungan antar variabel dalam model disajikan pada Tabel 5 dengan menggunakan uji Korelasi Pearson (*pearson correlation*). Secara umum terlihat bahwa belanja pemerintah, pembiayaan bank syariah, tingkat investasi dan jumlah pekerja memiliki hubungan positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel bebas meningkat maka akan meningkatkan tingkat PDRB atau pertumbuhan ekonomi secara positif. Bahkan tingkat korelasi variabel independen

terhadap variabel dependen relatif besar sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi yang terjadi signifikan secara statistik.

Least Square) atau biasa juga disebut common effect, Fixed Effect (FE) atau efek tetap, dan Random Effect (RE) atau efek random.

Tabel 6: Hasil Estimasi Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	OLS	Fixed Effects	Random Effects
	(1)	(2)	(3)
Ln BelanjaPemerintah	0.402497 (9.369858)	0.275873 (8.978957)	0.280061 (9.956436)
Ln PembiayaanSyariah	0.189970 (5.624687)	0.135204 (5.344960)	0.134887 (5.790112)
Ln Investasi	0.087506 (5.708688)	0.016595 (2.051059)	0.019932 (2.510873)
Ln JumlahPekerja	0.488919 (12.221890)	0.588615 (3.723245)	0.663831 (11.315590)
Constant	-2.854703 (-3.995586)	-1.726395 (-0.820113)	-2.887565 (-3.433860)
Observations	197	197	197
R-squared	0.930154	0.99588	0.856816
F-statistic	639.2235	1074.189	287.2337

Sumber: data diolah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini berusaha menganalisis belanja pemerintah, pembiayaan bank syariah, tingkat investasi dan jumlah tenaga kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model modifikasi fungsi produksi Cobb Douglas. Tabel 6 menyajikan hasil estimasi model OLS (Ordinary

Ket: nilai dalam kurung () adalah nilai *t-statistic*. Jika *t-statistic* > *t-tabel* maka signifikan.

R-square (R^2) pada Tabel 6 menunjukkan koefisiensi determinasi yang relatif besar, yaitu rata-rata di atas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa, misalnya pada model OLS, variabel independen berupa belanja pemerintah, pembiayaan bank syariah,

tingkat investasi dan jumlah tenaga kerja bekerja mampu menerangkan variasi PDB regional sebesar 93%. Selain itu, hasil Uji-F untuk masing-masing model (OLS, FE dan RE) pada Tabel 6 juga menunjukkan bahwa koefisien slope regresi signifikan secara statistik, yaitu bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDB regional.

Hasil estimasi regresi parsial juga diperlihatkan pada Tabel 6. Penelitian menemukan bahwa belanja pemerintah yang direpresentasikan oleh belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat output provinsi-provinsi di Indonesia. Arah pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat PDRB konsisten dalam model baik dalam model OLS, FE, maupun RE. Dengan demikian, peningkatan belanja pemerintah sebesar 1% akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) regional sebesar 0.40%, 0,27% dan 0.28% dengan menggunakan model estimasi OLS, FE dan RE. Hasil ini menunjukkan bahwa

belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, jalan toll, pelabuhan, dan bandara maupun gaji dalam bentuk peningkatan daya beli individu dapat memacu pertumbuhan ekonomi regional (provinsi). Dengan demikian, kebijakan fiskal melalui belanja anggaran pemerintah secara empiris menjadi penggerak sisi permintaan ekonomi dan berdampak pada peningkatan output.

Selanjutnya, pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan untuk masing-masing model OLS, FE dan RA sebagaimana terlihat pada Tabel 6. Dengan demikian pembiayaan bank syariah dalam bentuk modal kerja, investasi, dan konsumsi berpengaruh positif terhadap tingkat PDB provinsi-provinsi di Indonesia. Peningkatan pembiayaan bank syariah sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) sebesar 0.19%, 0.14% dan 0.13% untuk masing-masing model OLS, RE dan RE. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa sektor perbankan syariah secara khusus

dan perbankan nasional secara umum berkontribusi positif-sognifikan dalam pertumbuhan ekonomi fungsi intermediasi yaitu mobilisasi dana dari pihak pemodal (*surplus unit*) dan selanjutnya menyalurkan kepada sektor-sektor ekonomi produktif. Temuan ini mengkonfirmasi hipotesis *finance-led growth*, yaitu sektor perbankan dan keuangan adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi (lihat Rama, 2013). Dengan demikian, perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi secara empiris menjadi pemicu terjadinya peningkatan sisi permintaan ekonomi dan selanjutnya berdampak pada peningkatan output.

Temuan lainnya adalah bahwa tingkat investasi luar negeri sebagai proksi dari jumlah investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB). Peningkatan 1% tingkat investasi akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi regional sebesar 0.087% (model OLS), 0.016% (model FE), dan 0.019% (model RE). Namun, nilai koefisiensi hasil estimasi relatif rendah. Hal ini berarti bahwa kontribusi

sektor investasi luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi regional relatif kecil.

Terakhir, hasil estimasi Tabel 6 juga menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja dalam hal ini jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) untuk ketiga model regresi yang dikembangkan penelitian. Nilai koefisiensi regresi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja bekerja sebesar 1% akan berkontribusi pada peningkatan Produksi Domestik Bruto regional sebesar 0.488%, 0.488%, dan 0.663% untuk masing-masing model 1, 2 dan 3. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi didorong oleh tingkat pertumbuhan tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan Barro (1991) dan Romer (1991) bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya manusia (*human capita*) dan perubahan teknologi (*technological change*).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan fiskal berupa belanja pemerintah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi regional (provinsi) di Indonesia dengan menggunakan data 33 provinsi untuk periode 2010-2015. Output penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif-signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal yang terarah dan terencana. Selanjutnya, pembiayaan bank syariah dalam bentuk model kerja, investasi dan konsumsi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, bank syariah sebagai lembaga intermediasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui pemberian pembiayaan terhadap sektor usaha produktif. Olehnya, kebijakan fiskal pemerintah melalui anggaran belanja dan pembiayaan sektor perbankan secara empiris menjadi pendorong peningkatan sektor perintaan dalam perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional (output).

Oleh karena itu, pihak otoritas terkait perlu melakukan

kebijakan-kebijakan strategis demi mendorong pertumbuhan perbankan syariah di seluruh provinsi-provinsi di Indonesia. Karena hal ini berdampak pada pertumbuhan GDP regional.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah investasi luar negeri berkontribusi positif-signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi. Akan tetapi, kontribusi sektor ini relatif kecil dibandingkan dengan sektor lainnya yang ditandai dengan nilai koefisiensi yang kecil. Dengan demikian, kebijakan peningkatan volume investasi baik dalam maupun luar negeri dapat memacu pertumbuhan regional. Tentunya, pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan-kebijakan strategis demi meningkatkan volume aliran modal untuk menumbuhkan perekonomian regional.

Faktor tenaga kerja khususnya jumlah penduduk bekerja juga berpengaruh positif-signifikan terhadap output regional. Pertumbuhan tenaga kerja menjadi penopang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan kebijakan strategis yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah demi mencapai pertumbuhan ekonomi regional yang tinggi dan berkualitas.

REFERENSI

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47.
- Agell, J., Lindh, T., & Ohlsson, H. (1999). Growth and the public sector: A reply. *European Journal of Political Economy*, 15(2), 359-366.
- Awe, A. A., & Funlayo, A. K. (2014). The Short and Long-Run Implications of Budget Deficit on Economic Growth in Nigeria (1980-2011). *Canadian Social Science*, 10(5), 201-205.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103-S125.
- Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2014). *Principles of Macroeconomics*. Now York: Pearson.
- Darrat, A. F. (1988). The Islamic Interest-Free banking System: Some Empirical Evidance. *Applied Economics*, 20, 417-425.
- El-Galfy, A., & Khiyar, K. A. (2012). Islamic banking and economic growth: A review. *Journal of Applied Business Research*, 28(5), 943-956.
- Fan, S., Zhang, X., & Rao, N. (2004). Public Expenditure , Growth , and Poverty Reduction in Rural Uganda. *DSGD Discussion Papers IFPRI*, (4).
- Furqani, H., & Mulyany, R. (2009). Islamic banking and economic growth: Empirical evidence from Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30(2), 59-74.
- Hong, H., & Ahmed, S. (2002). Government Spending on Public Goods: Evidence on Growth and Poverty. *Economic and Political Weekly*, xliv(31), 102-108.

- Loizides, J., & Vamvoukas, G. (2005). Government Expenditure and Economic Growth: Evidence From Trivariate Causality Testing. *Journal of Applied Economics*, VIII(1), 125–152.
- Mankiw, G. (2010). Principles of Macroeconomics. *Business*, 17, 957.
- Musri, M., & Rama, A. (2015). Analisis Perilaku Deposita Perbankan di Indonesia: Studi Kasus Bank Syariah dan Konvensional. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 1–34.
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Ekonometrika*. Jakarta: FE UI.
- Nasiru, I. (2012). GOVERNMENT EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA: COINTEGRATION ANALYSIS AND CAUSALITY TESTING. *Academic Research International*, 2, 718–723.
- Rama, A. (2013). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Signifikan*, 2(1), 33–56.
- Rama, A. (2015). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 1–25.
- Rama, A. (2015). *Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rama, A. (2016, February). Indeks Keislaman Ekonomi. *Koran Republika*, p. 6.
- Rama, A., & Kassim, S. H. (2013). Analyzing Determinants of Assets and Liabilities in Islamic Banks: Evidence from Indonesia. *Review of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 34–53.
- Rama, A., & Mahklani. (2014). Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam. *Iqtishad*, VI(1), 22–52.
- Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1), 1–18.
- Rama, A. (2015). Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 87–120.

- Rama, A. (2016). Konstruksi Indeks Keislaman Ekonomi dan Kajian Empirisnya di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 9(III), 558–594.
- Rama, A. (2015). *Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rama, A., & Makhiani. (2013). Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Dialog*, 1(1), 31–46.
- Rama, A., & Meliawati. (2014). Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 95–115.
- Rama, A., & Novela, Y. (2015). Shariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan*, 4(2), 111–126.
- Remali, Y., & Wilson, R. (2005). An Economic Analysis of Conventional and Islamic Bank Deposits in Malaysia. *Review of Islamic Economics*, 9(131-52).
- Sinulingga, F. W. (2015). Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal BPK*, 8(1), 41–52.
- Sriyana, J. (2011). The Effect of Budget Deficit Shock on Government Spending: An Empirical Case in Indonesia. *An International Journal of Business and Development Studies*, 3, 41–58.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Yurdakul, F., & Ucar, B. (2015). The Relationship between Current Deficit and Economic Growth: An Empirical Study on Turkey. *Procedia Economics and Finance*, 26, 101–108.